

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PENGANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA

Teguh Trisugiarto¹
sendietera@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to identify effectiveness implementation of performance-based budgeting system and performance achievements. The concept of budgeting is based on the logic models that find the relationship between inputs, processes, outputs and outcomes also customer oriented (external perspective). This study uses literature study and compare with other studied. From this studied, the results then compared with the provisions and the purpose of performance achievement. The result shows that the performance-based budgeting system can applied and support in achieving the vision and mission as well as the effect on performance. But the performance measurement only on budget absorption. Moreover, there are inconsistencies when use performance indicators.

Keywords: *Budgeting system, Performance, Logic Model*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya reformasi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yang meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini menjadi tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara. Undang-undang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini mendorong Pemerintah agar lebih profesional dalam pengelolaan keuangan. Banyak perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dan pemeriksaan oleh pengawas.

Sebelum reformasi di bidang keuangan, sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku menggunakan pendekatan *line item* dan *incremental* (BPG:2014), dimana dalam pendekatan *line item* lebih berorientasi pada input sedangkan pada pendekatan *incremental* lebih pada perspektif tahunan. Setelah munculnya Undang-Undang Keuangan Negara, sistem perencanaan dan penganggaran mengalami

¹ Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

perubahan. Ada 3 (tiga) jenis pendekatan yang dilakukan, yaitu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan amanat dari Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Dalam *Better Practice Guide* (2014) pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah diartikan sebagai pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dimana dalam pengambilan keputusan menimbulkan dampak anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Artinya dalam beberapa tahun kedepan perencanaan anggaran sudah dapat diprediksi. Sedangkan pendekatan Anggaran Terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan di Kementerian/Lembaga. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari duplikasi anggaran yang nantinya akan dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Sementara itu Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dan dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Penjelasan PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam pelaksanaan penganggaran sektor publik, masyarakat selalu menyoroti pengeluaran anggaran dan kinerja Pemerintah. Sebab pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan Pemerintah (Guritno Mangkoesoebroto:2001). Mereka mempunyai harapan bahwa sudah sepatutnya pemerintah menunjukkan kinerjanya sesuai dengan anggaran yang dikelola. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan Ekonomi (Mulia P. Nasution:2014). Sehingga perencanaan dan penganggaran mempunyai peran yang sangat penting. Jika sistem perencanaan dan penganggaran sudah disusun secara matang, terukur, dan terarah maka diharapkan target kinerja dapat tercapai.

2. PERMASALAHAN

Jika melihat dari sisi anggaran, maka cukup mudah untuk melakukan penilaian atas pencapaian kinerja, yaitu melihat capaian realisasi anggaran. Dengan menggunakan prinsip *value for money*, kemudian akan dinilai dari sisi efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. Efisiensi akan melihat selisih dana dengan realisasi yang berasal dari penghematan. Efektifitas melihat terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana atau tercapainya target realistis. Sedangkan ekonomis artinya bertindak dengan menggunakan prinsip ekonomi.

Kemudian dari sisi hasil, sebelum penerapan *logic model*, fokus capaian kinerja hanya sampai pada tahap output. Hal ini tentu saja sangat mungkin untuk dihitung capaian realisasinya karena tahap output lebih bersifat fisik. Tetapi kemudian masalah yang selanjutnya muncul adalah apakah pengukuran kinerja terhadap *outcome* dan *impact* dari pelaksanaan anggaran itu bisa dilakukan dan benar-benar dapat dilakukan?

3. PEMBAHASAN

Sistem informasi penganggaran di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan diatas, dilaksanakan dengan berbagai pendekatan dalam penyusunannya. Ketiga sistem penganggaran tersebut dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan

kepada masyarakat dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi serta berpedoman pada efisiensi dan efektifitas.

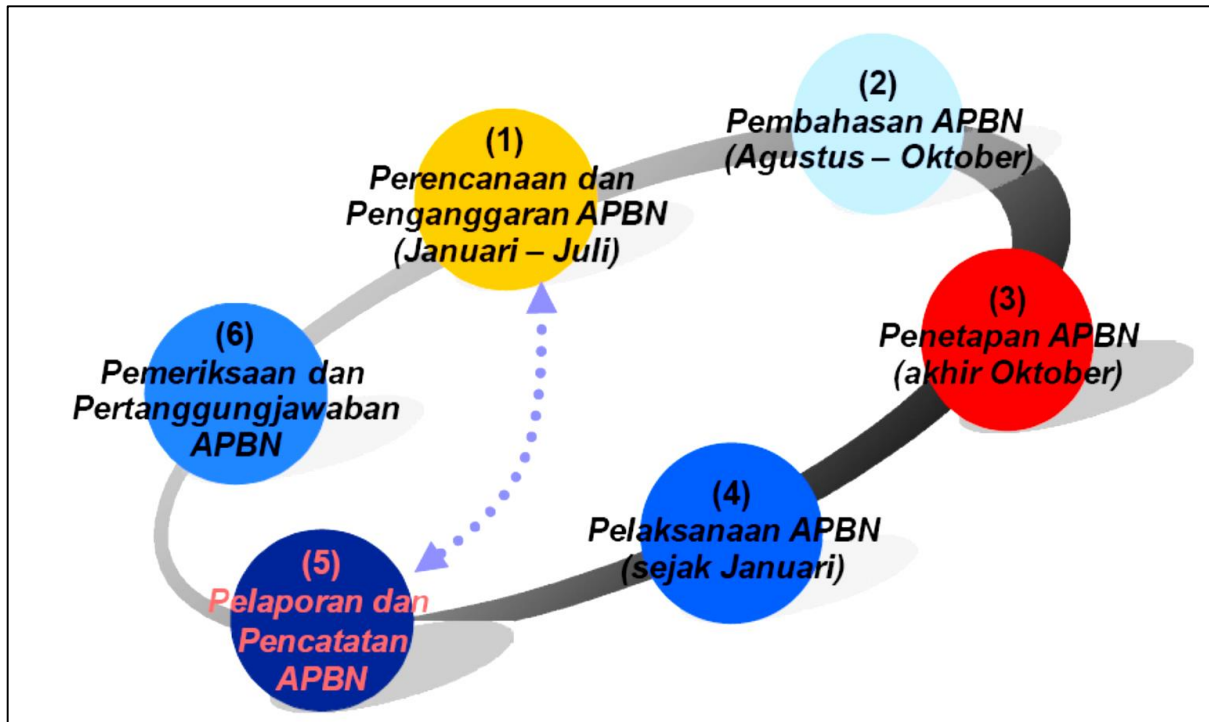
“Sistem perencanaan yang efektif merupakan persyaratan dalam organisasi sektor publik sehingga akuntansi manajemen merupakan bagian penting sebagai penyedia informasi untuk menjalankan sistem. Di dalam proses perencanaan strategi, manajemen membuat tujuan organisasi dan tujuan utama strategi. Secara konseptual, proses pemrograman mengacu pada tujuan-tujuan dan strategi yang diberikan dan mengidentifikasi program yang akan memfasilitasi tujuan dan strategi tersebut. (Bastian:2001, hal 81).”

Seperti yang disampaikan oleh Hansen & Mowen (2005), bahwa sebuah sistem penganggaran yang ideal apabila sistem tersebut bisa mewujudkan *goal congruence* serta mampu mendorong para manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara-cara yang etis. Oleh karena itu, agar sistem penganggaran bisa efektif, maka kegiatan-kegiatan yang disusun harus mencerminkan upaya untuk mendukung tujuan negara. Selain itu bahwa sistem penganggaran yang ada hendaknya bisa diwujudkan sesuai dengan ketentuan serta menghindari dari kemungkinan penyalahgunaan.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian: 2001, 79). Anggaran ini merupakan cerminan dari apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk didalamnya adalah kebijakan. Karena didalam anggaran terdiri dari pos penerimaan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap masyarakat. Secara lebih detail anggaran mempunyai beberapa fungsi (Bastian: 2001, 80), antara lain:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai pengendali unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrumen politik.
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Siklus penganggaran di Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1: Siklus Penyusunan APBN

Sumber: Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia, 2014

Seperti terlihat pada gambar, sistem penganggaran di Indonesia dimulai setahun sebelum pelaksanaan anggaran itu sendiri. Artinya, anggaran yang kita susun memang dirancang dengan sangat matang dan melibatkan berbagai elemen. Selain itu, masyarakat dapat juga ikut memantau dalam perencanaan anggaran, sehingga ini merupakan salah satu kontrol atau sistem pengendalian dalam penyusunan anggaran. Dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran APBN pada bulan Januari - Juli kemudian dilakukan pembahasan pada bulan Agustus - Oktober. Penetapan APBN sendiri dilaksanakan pada akhir bulan Oktober.

Kinerja merupakan pencapaian atau keberhasilan dari tahap perencanaan yang sudah disusun dengan berpedoman pada visi dan misi yang sudah ditetapkan. Untuk dapat mengukur pencapaian tersebut, maka diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator yang terdiri atas indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) (Bastian, Indra, 2001). Input ini akan digunakan untuk menghasilkan output. Kemudian jika memang output ini berhasil sesuai dengan yang direncanakan, maka hal ini akan tercermin dalam outcome. Outcome ini merupakan perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan kondisi, entah itu yang bersifat positif atau justru bersifat negatif. Konsep seperti ini dikenal dengan istilah *logic model*. Secara sederhana, konsep *logic model* dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2: Logic Model

Bastian dan Indra (2001) dalam Akuntansi Sektor Publik di Indonesia menyampaikan tahapan dalam menyusun indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran.
- b. Mengidentifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan dan dijadikan indikator kinerja.
- c. Memilih indikator kinerja yang paling relevan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.

Seperti disebutkan diawal, sistem perencanaan penganggaran memegang peranan penting dalam pencapaian kinerja. Tetapi pada akhirnya untuk memastikan hal tersebut harus dilakukan pengukuran hasil dari pelaksanaan anggaran tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan akan memberikan suatu perbaikan bagi sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran ditahun-tahun berikutnya.

Beberapa penelitian dan literatur terkait hubungan antara sistem penganggaran dan pencapaian kinerja anatara lain sebagai berikut:

1. Timothy D. West dkk (2010) menyebutkan bahwa sistem penganggaran berbasis kinerja dengan penyesuaian (Performance Based Adjustment Model/PBAM) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pada U.S Army Medical Command (MEDCOM) melalui tulisannya dalam *Accountability Through Performance Based Budgeting*. Akuntabilitas yang dimaksudkan disini adalah kinerja yang berhubungan dengan keputusan yang diambil langsung oleh pihak manajemen. Selain itu diketahui pula bahwa dengan meningkatnya anggaran maka pengawasan yang dilakukan juga lebih ketat.
2. Dwi Sudaryanti (2013) melakukan penelitian terkait pengaruh penganggaran terhadap kinerja aparat Pemda melalui sistem informasi keuangan daerah. Hasilnya adalah penganggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Tetapi dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai alat pengendalian terhadap pencapaian kinerja penganggaran berpengaruh secara signifikan.
3. Kajian yang dilakukan oleh Noor Cholis Madjid dan Hasan Ashari (2012) tentang penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa perencanaan dan penganggaran telah disusun sesuai dengan ketentuan. Namun demikian tujuan yang dibuat dalam renstra (rencana strategis, turunan dari visi misi) ternyata tidak dapat dibandingkan dengan RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga). Hal ini mengindikasikan ada masalah pada sistem perencanaan yang harus dibenahi.
4. Tahun 2012 Puji Agus dan Riyanto melakukan kajian akademis tentang Pengaruh Implementasi Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis

- Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Terhadap Kinerja. Hasilnya menunjukkan bahwa Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap kinerja. Kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua jenis pelaporan kinerja ini mengukur capaian realisasi dan capaian output.
5. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) oleh Noor Cholis Madjid dan Hasan Ashari (2013). Hasilnya menunjukkan *outcomes* yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) berbeda. Namun *outcomes* dalam Renja Sudah sama dengan dokumen RKA KL. Selain itu output dalam Renstra tidak dapat langsung dijabarkan dalam renja. Hal ini menunjukkan tidak konsistennya dalam tahap perencanaan sehingga akan sulit dalam melakukan pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPK baru sebatas pada penyerapan anggaran.
 6. Fatchan Achyani dan Bayu Tri Cahya (2011) melakukan Analisis Aspek Rasioanl dalam Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Surakarta. Hasilnya menunjukkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja masih belum bisa diukur dari sisi kinerja secara keseluruhan, bahkan dari sisi capain output sekalipun. Hal ini karena masih kentalnya paradigma lama dalam sistem penganggaran yang hanya berorientasi sekedar untuk menghabiskan anggaran.
 7. Dalam Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan (Anita Wahyu, et al: 2012) diperoleh data penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan menunjukkan kurangnya pemahaman terkait indikator kinerja oleh pegawai yang bertugas di bagian perencanaan. Hal ditunjukan dengan adanya perbedaan indikator *outcome* untuk kegiatan-kegiatan dalam satu program dan adanya perbedaan target kinerja sasaran renstra SKPD dengan RPJMD.
 8. Penelitian tentang Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado (Palilingan, Anastasia F, et all : 2015) menunjukkan hasil kinerja yang relatif baik karena realisasi anggaran tidak melebihi dari yang dianggarkan dengan capaian rata-rat 90,75% untuk periode tahun 2009-2013. Dapat dilihat bahwa orientasi penelitian masih berfokus pada sebatas capaian realiasasi.
 9. Wahyu Sulistiadi (2008) menulis tentang Sistem Anggaran Rumah Sakit yang Berorientasi Kinerja untuk Meningkatkan Kualitas Keuangan Publik. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem anggaran yang berorientasi pada kinerja memberi dampak yang positif, antara lain dengan dana yang terbatas dapat digunakan untuk menangani keperluan rumah sakit yang sangat banyak, walaupun dengan cara bertahap. Tetapi masih ada kendala terkait *output measurement* pelayan rumah sakit yang masih abstrak.
 10. Penelitian terkait Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Layanan Umum (BLU) (Studi pada Fakultas "X" Universitas "Y") oleh Kurnia Mursitawati (2014) didapatkan hasil penyusunan anggaran berbasis kinerja secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan. Tetapi masih ada

yang beberapa hal yang belum dilakukan antara lain menghitung capaian kinerja, jadwal penyusunan anggaran yang tidak sesuai dengan jadwal, serta tidak ada indikator kinerja sebagai salah satu instrumen untuk pengukuran kinerja.

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, sistem penganggaran sudah mengarah pada penyusunan anggaran dengan berorientasi pada kinerja yang akan dihasilkan. Selebihnya tidak ada masalah terhadap sistem penganggaran yang digunakan, hanya kendala pada pemahaman dan persyaratan administrasi. Berdasarkan konsep *logic model*, maka sistem penganggaran dilakukan dengan melihat hubungan tiap proses, mulai dari *input*, aktivitas, *output*, sampai dengan *outcome*, pelaksanaan penganggaran. Tetapi pada pelaksanaannya baru sebatas pada taraf menghitung kinerja dari sisi realisasi anggaran. Selain itu masih terdapat perbedaan dalam menentukan indikator kinerja.

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Madjid dan Hasan (2013) bahwa telah dilakukan evaluasi kinerja, walau baru hanya dari aspek penyerapan anggaran. Disisi lain, Agus dan Riyanto (2012) menyampaikan bahwa pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) secara rata-rata pada satuan kerja pemerintah pusat di Jawa Barat masih tergolong rendah yaitu sebanyak 46 % dari kondisi ideal. Namun hal ini dapat dipahami, mengingat bahwa pengimplementasiannya bukan merupakan hal yang mudah, namun tetap ada upaya ke arah perbaikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan anggaran mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Karena dengan sistem penganggaran yang sesuai dan tepat maka visi dan misi yang ditargetkan bisa dicapai. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penganggaran yang berorientasi pada kinerja bisa dan dapat diterapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang ditetapkan dan berpengaruh terhadap kinerja.
2. Penilaian kinerja didasarkan pada perbandingan dana yang dianggarkan dan realisasi pengunannya serta capaian output.
3. Terdapat perbedaan keterkaitan antara dokumen perencanaan (renstra) dan dokumen penganggaran.

Saran dapat disampaikan bagi pengembangan sistem penganggaran dan penelitian berikutnya antara lain:

1. Perlunya penyempurnaan sistem penganggaran dan dukungan pengembangan agar dapat digunakan oleh semua pihak dan mudah dalam pengaplikasiannya.
2. Pengukuran kinerja tidak terbatas pada capaian realisasi anggaran dan output, tapi agar bisa mengukur outcome yang dihasilkan bahkan dampak yang ditimbulkan dalam jangka panjang juga agar bisa diperhitungkan dalam perencanaan anggaran.
3. Keterkaitan antar dokumen (indikator kinerja) perlu mendapat perhatian khusus agar kinerja yang dicapai "*comparable*".

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Puji, Riyanto, 2012. Pengaruh Implementasi Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Terhadap Kinerja. Kajian Akademis BPPK
- Achyani, Fatchan, Bayu Tri Cahya, 2011. Analisis Aspek Rasional dalam Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Surakarta. Maksimum Vol. 1 No. 2 : 68-77
- Hansen, Don R., Maryanne M. Mowen, 2005. *Managerial Accounting : Eighth Editon*. US : Thomson South-Western.
- Madjid, Noor Cholis, Hasan Ashari, 2012. Kajian Terhadap Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) pada Kementerian Keuangan. Kajian Akademis BPPK
- Madjid, Noor Cholis, Hasan Ashari, 2013. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Kajian Akademis BPPK
- Mursitawati, Kurnia, 2014. Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Layanan Umum (BLU) (Studi pada Fakultas "X" Universitas "Y"). Jurnal Ilmiah FEB UB
- Palilingan, Anastasia F, et al, 2015. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado
- Sudaryanti, Dwi, 2013. Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 12 : 11-24
- Sulistiadi, Wahyudi, 2008. Sistem Anggaran Rumah Sakit yang Berorientasi Kinerja untuk Meningkatkan Kualitas Keuangan Publik. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2 No. 5: 234-240
- West, Timothy D., et al, 2010. *Increasing Accountability Through Performance-Based Budgeting*. *Journal of Financial Management: Increasing*: 51-55
- Wijayanti, Anita Wahyu, et al, 2012. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Wacana Vol. 15 No. 3 :10-17
- Kementerian Keuangan, 2014. Better Practice Guide: Penganggaran Berbasis Kinerja
- Kementerian Keuangan, 2014. Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia
- Nasution, Mulia P, 2014. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Mangkoesebroto, Guritno, 2001. *Ekonomi Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga